

Peran Bapelitbang Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah

Rikardus Weo¹

Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Nipa, Maumere
Email: richardweo35@gmail.com

Antonius Philipus Kurniawan²

Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Nipa, Maumere
Email: antonius.philipus@gmail.com

Vinsensius Ama Muda³

Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Nipa, Maumere
Email: vinsensius.amamuda@gmail.com

Korespondensi penulis : richardweo35@gmail.com

Abstract: *This research aims to determine the role of planning, research and development agency in increasing local tax revenues in Sikka Regency. The data collecting techniques used in this writing were observation, interviews and documentation at Bapelitbang, especially in the economy sector and natural resources (PSDA) which has an obligation to monitor and evaluate the receipt of regional original income including regional tax revenue. The results of this writing showed that Bapelitbang also plays a role in increasing local tax revenues through the preparation of local tax plans that take into account factors such as revenue potential, efficiency, and service quality. On the other hand, the economic and natural resources sectors must perform a large number of duties, but this was still a problem due to a lack of personnel in these sectors. This condition makes it difficult for them to carry out their role in monitoring and coordinating regional tax revenues.*

Keywords: *Role, Local Taxes, Planning, Research and Development Agency (Bapelitbang)*

Abstrak. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui peran Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah di Kabupaten Sikka. Pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi pada Bapelitbang khususnya di bidang Perekonomian Dan Sumber Daya Alam (PSDA) yang memiliki kewajiban untuk melakukan monitoring serta evaluasi terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah meliputi Penerimaan Pajak daerah. Hasil penulisan menunjukkan bahwa Bapelitbang turut berperan dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah melalui penyusunan rencana pajak daerah yang memperhitungkan faktor-faktor seperti potensi penerimaan, efisiensi, dan kualitas pelayanan. Banyaknya tugas yang harus dilaksanakan oleh bidang PSDA serta jumlah sedikitnya jumlah personel pada bidang tersebut menjadi kendala tersendiri bagi bidang PSDA dalam menjalankan perannya dalam memonitoring dan mengkoordinasi terkait penerimaan Pajak Daerah.

Kata Kunci : Peran, Pajak Daerah, Bapelitbang

PENDAHULUAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, “Anggaran pendapatan dan belanja daerah selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah”. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Alfred Labi, 2019 menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan Pemda (Pemerintah Daerah), dimana pada suatu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah selama satu tahun anggaran tertentu, dan di pihak lain menggambarkan perkiraan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran yang dimaksud.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh suatu daerah dari hasil pemanfaatan sumber daya yang ada di daerah itu sendiri. Menurut Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah pasal 1 poin ke 18 menyatakan bahwa PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perlu diketahui bahwa sumber penerimaan PAD salah satunya berasal dari hasil pemungutan pajak daerah.

Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Kabupaten Sikka khususnya pada bidang PSDA melaksanakan fungsinya yang salah satunya adalah fungsi Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Ekonomi. Dalam menjalankan fungsinya ini, bidang PSDA melakukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah (MONEV PAD) pada sejumlah Organisasi Pemerintah Daerah pengampu PAD yang berada di daerah Kabupaten Sikka. Pajak Daerah menurut Perda Sikka nomor 10 tahun 2011 dalam pasal 1 poin ke 8 adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan data dari Bapelitbang, target maupun realisasi penerimaan Pajak Daerah secara totalnya mengalami fluktuatif, realisasi penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Sikka mengalami kenaikan yang cukup besar pada tahun 2019 dan kemudian mengalami penurunan pada tahun 2020 dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2021 meskipun jumlah peningkatannya terbilang kecil.

METODE

Metode yang digunakan untuk meguraikan hasil penulisan ini adalah secara deskriptif. Sedangkan penulis mengumpulkan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi dilakukan selama bulan Oktober 2022 hingga bulan Desember 2022. Informan wawancara adalah Jabatan Fungsional (Jafung) bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (PSDA), wawancara ini dilakukan pada tanggal 21 September 2022 pada jam 10:30 sampai dengan 11:00 WITA. Dokumentasi dilakukan bersama Jafung Perekonomian pada bidang PSDA .

Secara ringkas metode pelaksanaan kegiatan yang digunakan oleh penulis dapat digambarkan dalam diagram berikut.



Gambar 1. Diagram Pelaksanaan Kegiatan

HASIL

Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) turut mengambil peran dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kabupaten Sikka. Peran Bapelitbang ini sesuai dengan fungsi Bapelitbang itu Sendiri, Yaitu fungsi perencanaan, penelitian dan juga fungsi pengembangan daerah. Perlu diketahui bersama bahwa tinggi atau rendahnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada suatu kabupaten dipengaruhi dari seluruh sumber PAD yang mana salah satunya berasal dari penerimaan Pajak Daerah.

Dalam kaitannya dengan penerimaan Pajak Daerah dan sesuai dengan fungsi Bapelitbang seperti yang sudah dijelaskan diatas maka diketahui bahwa peran Bapelitbang dalam meningkatkan penerimaan Pajak Daerah yaitu Bapelitbang bertanggung jawab untuk merancang dan menyusun rencana pajak daerah untuk meningkatkan penerimaan dan efisiensi, Bapelitbang menjalankan studi dan penelitian untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah meliputi analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak, seperti tingkat ekonomi, tingkat pendidikan, dan tingkat kesadaran wajib pajak, Bapelitbang bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mengimplementasikan

strategi dan program untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah seperti program peningkatan kesadaran dan partisipasi wajib pajak, serta Bapelitbang memantau dan mengevaluasi kinerja sistem pajak. Ini meliputi mengukur efektivitas program pajak, memantau penerimaan pajak, dan membuat ajustemen yang diperlukan untuk meningkatkan penerimaan pajak.

Dari peran Bapelitbang Sikka seperti yang dijelaskan di atas, Perlu diketahui bahwa Bapelitbang bukanlah lembaga yang melakukan pemungutan langsung Pajak Daerah. Melainkan Bapelitbang hanya melakukan koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah yang melakukan pemungutan terhadap Pajak dan Retribusi Daerah, hal ini sesuai dengan Peraturan Bupati Sikka Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan. Terkait dengan penerimaan Pajak Daerah, Bidang yang berperan melakukan koordinasi serta menjalankan tugas dan fungsi Bapelitbang dalam meningkatkan penerimaan Pajak Daerah adalah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (PSDA).

DISKUSI

Penerimaan Pajak Daerah penting bagi pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Menurut Sitompul & Lubis (2013:8) “Pendapatan Asli Daerah merupakan modal dasar pemerintah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang juga merupakan usaha pemerintah daerah untuk memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah pusat”. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mendefinisikan bahwa Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Mustoffa (2018:3) “Pajak Daerah adalah komponen PAD yang diperoleh daerah dari masyarakat sebagai suatu kewajiban tanpa adanya janji penerimaan (pengembalian) manfaat kembali secara langsung oleh masyarakat dari daerah”.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Harapan kepada Bapelitbang agar dapat memfasilitasi diskusi dengan masyarakat untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dialami dalam proses pembayaran pajak dan membantu mengatasinya. Harapan selanjutnya adalah Bapelitbang bisa memperkuat sistem monitoring dan evaluasi penerimaan pajak untuk memastikan bahwa target penerimaan pajak tercapai dan untuk mengatasi masalah yang mungkin terjadi.

KESIMPULAN

Bapelitbang Sikka mempunyai peran yang cukup penting dalam kaitannya dengan peningkatan penerimaan Pajak Daerah. Peran Bapelitbang ini sesuai dengan tugas dan fungsi Bapelitbang itu sendiri yaitu, menjalankan fungsi perencanaan, penelitian dan juga fungsi pengembangan. Dalam menjalankan perannya terkait peningkatan penerimaan Pajak Daerah itu menjadi tugas daripada bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (PSDA). Namun peran besar Bapelitbang Sikka dalam penerimaan Pajak Daerah juga dibatasi oleh salah satu Perbup Sikka terkait tugas dan fungsi Bapelitbang Sikka yang menyatakan bahwa Bapelitbang hanya menjalankan peran sebagai koordinator antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melakukan pemungutan langsung Pajak dan Retribusi Daerah. Yang menjadi kendala bagi Bapelitbang dalam hal ini adalah bidang PSDA yang mempunyai peran terkait penerimaan Pajak Daerah adalah terbatasnya jumlah personel pada bidang tersebut.

SARAN

Sesuai dengan kendala yang telah disebutkan disebutkan sebelumnya bahwa kurangnya jumlah pegawai pada bidang PSDA sehingga disarankan untuk menempatkan jumlah pegawai yang cukup pada bidang tersebut. Bapelitbang juga disarankan agar dapat memfasilitasi diskusi dengan masyarakat untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dialami dalam proses pembayaran pajak dan membantumengatasinya. Serta Memperkuat sistem monitoring dan evaluasi penerimaan pajak untuk memastikan bahwa target penerimaan pajak tercapai dan untuk mengatasi masalah yang mungkin terjadi.

DAFTAR REFERENSI

- Labi, Alfred. (2019). Analisis kinerja anggaran pendapatan dan belanja daerah pada pemerintah daerah kabupaten pulau morotai tahun anggaran 2013-2015. *Jurnal akuntansi bisnis dan ekonomi* 1:1360
- Mustoffa, Ardyan Firdausi. (2018). Kontribusi dan efektifitas pajak daerah kabupaten Ponorogo. *Jurnal Akuntansi dan Pendidikan* 1:3
- Peraturan Bupati Sikka Nomor 48 Tahun 2016. Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Dan Penelitian Dan Pengembangan. 15 Desember 2016. Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 48. Maumere
- Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 10 Tahun 2011. *Pajak Daerah*. 24 Desember 2011. Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2011 Nomor 10. Maumere.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. 15 Mei 2006. Jakarta.
- Sitompul, Maradona & Lubis, Atmey. (2013). Analisis sumber-sumber pendapatan asli daerah sebagai modal pembangunan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik* 1(1): 1-10
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022. *Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah*. 5 Januari 2022. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. 15 September 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004. *Pemerintahan Daerah*. 15 Oktober 2004. Lembaran Negara republic Indonesia 2004 nomor 125. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004. *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah*. 15 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Jakarta.